

# I PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi makro Indonesia tahun 2006 stabil, tapi tidak lebih baik dari kondisi tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2006 sebesar 5,5 persen, di bawah pertumbuhan dalam tahun 2005 sebesar 5,6 persen. Kondisi 2006 itu terutama karena rendahnya kegiatan di sektor riil, dan rendahnya daya beli masyarakat.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2006 adalah ekspor yang tumbuh 4,1 persen, konsumsi rumah tangga 1,9 persen, konsumsi pemerintah 0,7 persen, pembentukan modal tetap bruto 0,7 persen, serta pengaruh impor yang tumbuh 2,8 persen. Dua Tabel Produk Domestik Bruto 2005-2006 di bawah menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 2006.

## Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2005-2006 (dalam %)

No	LAPANGAN USAHA	2005	2006
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13,1	12,0
2	Pertambangan dan Penggalian	11,1	10,6
3	Industri Pengolahan	27,7	28,1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,0	0,9
5	Konstruksi	7,0	7,5
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,4	14,9
7	Transportasi dan Komunikasi	6,5	6,9
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	8,3	8,1
9	Jasa-Jasa Lain	9,9	10,1
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PDB Tanpa Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>88,6</b>	<b>89,2</b>

Sumber: BPS

## Nilai dan Laju Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan 2005-2006

No	KOMPOSISI PENGGUNAAN	Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Triliun Rupiah)		Laju Pertumbuhan (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
		2005	2006	2005	2006	2006	2006
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.785,6	2,092,7	1,043,8	1,076,9	3,2	1,9
2	Konsumsi Pemerintah	225,0	288,1	134,6	147,6	9,6	0,7
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	667,6	800,1	393,2	404,6	2,9	0,7
4	a. Perubahan Inventori	27,7	19,6	18,7	13,1		
	b. Diskrepansi Statistik	-/ 30,5	-/ 23,0	4,3	24,1		
5	Ekspor	936,0	1.030,8	792,0	864,5	9,2	4,1
6	Dikurangi dengan Impor	816,4	870,1	635,9	684,1	7,6	2,8
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>		<b>2.785,0</b>	<b>3.338,2</b>	<b>1.750,7</b>	<b>1.846,7</b>	<b>5,5</b>	<b>--</b>

Sumber: BPS

Rendahnya kegiatan di sektor riil tidak saja dapat dilihat dari rendahnya tingkat investasi selama tahun 2006, tetapi juga dari sisi produksi berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi motor pertumbuhan. Selama tiga triwulan pertama tahun 2006 sektor industri manufaktur hanya tumbuh sekitar 4,1 persen, lebih rendah dari pertumbuhannya pada periode yang sama tahun 2005, yaitu sekitar 5,2 persen.

Tidak kunjung membaiknya sektor industri tidak terlepas dari kondisi dunia usaha yang secara keseluruhan masih memprihatinkan. Stabilitas rupiah dapat dipertahankan, dan bahkan rupiah terus menguat, tapi belum cukup kondusif untuk meningkatkan investasi. Biaya produksi, terbatasnya pasokan energi dan buruknya infrastruktur menjadi kendala utama penting yang dirasakan oleh dunia usaha, tidak saja karena terbatasnya pasokan energi dan buruknya infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dengan adanya berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada dunia usaha. Kondisi tersebut diperberat dengan tidak kunjung teratasinya masalah penyelundupan secara tuntas yang menyebabkan terdesaknya produksi dalam negeri oleh barang-barang impor ilegal yang berharga lebih murah.

Tentu saja pengelolaan dan pembangunan perekonomian tidak bisa berdasarkan pada suatu kondisi jangka pendek. Tetap diperlukan acuan perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan jangka menengah dan pendek. Dalam kaitan dengan perencanaan jangka panjang, pada tahun 2004 telah berkembang wacana mengenai Visi Industri Indonesia 2030 dan untuk jangka menengah perlu ada suatu peta-jalan pembangunan industri yang disebut roadmap industri 2010.

Tahun 2007 adalah pertengahan dari perencanaan jangka menengah tersebut. Ini merupakan momentum yang tepat (*decisive momentum*) untuk melakukan tinjauan atau review terhadap roadmap 2010 maupun terhadap Visi 2030. Berdasarkan momentum itulah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2007 diselenggarakan dengan tema "**MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL MELALUI PENINGKATAN INVESTASI, Penguatan Peran Pengusaha Daerah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,**" serta subtema "**MEMPERCEPAT LANGKAH-LANGKAH UNTUK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI, PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, PENINGKATAN Daya Saing dan Pengembangan Warisan Budaya.**" Topik-topik pembahasan dalam persidangan Rapimnas Kadin 2007 difokuskan tema dan subtema tersebut.

## II

# KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS DEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

### A. KEBIJAKAN STRATEGIS

**S**aat ini pertumbuhan perekonomian Indonesia relatif rendah yang tidak mencukupi untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing ekonomi.

Kadin secara konsisten telah banyak memberikan masukan kepada pemerintah. Pada awal pemerintahan periode 2004-2009 masukan dirangkum dalam Road Map Kadin. Selanjutnya secara aktif memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kebijakan strategis pada departemen dan kementerian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha nasional. Diakui banyak yang belum dapat dilaksanakan hal ini banyak terkait dengan proses birokrasi yang lambat di pihak pemerintah serta proses legislasi yang berkepanjangan di DPR karena banyaknya pandangan masing-masing fraksi yang harus dicarikan titik temunya.

Melalui Rapimnas 2007, Kadin menyampaikan kepada pemerintah, DPR dan masyarakat suatu cetak biru Visi 2030 dan Road Map 2010 Industri Nasional.

Cetak Biru Industri Nasional pada prinsipnya diharapkan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi dengan memperhatikan potensi masing-masing sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif merata secara nasional.

#### 1. VISI 2030 INDUSTRI NASIONAL

Dalam periode 25 tahun ke depan dengan dasar sistem politik yang demokratis dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung setiap lima tahun, diharapkan dapat diciptakan Republik Indonesia sebagai **Negara Industri Maju dan Bangsa Niaga Tangguh** yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, melalui:

- a. Kebangkitan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur dan jaringan penjualan produk Industri Nasional, terutama dengan menghasilkan barang dan jasa berkualitas unggul yang menang bersaing dengan produk negara negara lain.
- b. Kebangkitan kekuatan industri pengolah hasil sumber daya alam dengan produk olahan bermutu terjamin, baik dalam rangka swasembada pangan secara lestari maupun untuk pasar ekspor.
- c. Kebangkitan daya cipta dan kreativitas rekayasa dan rancang bangun putra putri Indonesia, sehingga industri nasional berbasis tradisi dan budaya bangsa dapat tumbuh berkembang kembali melalui produk berkualitas tinggi yang dicintai dan digunakan dalam kehidupan sehari hari sebagai "*life style*" masyarakat Indonesia.

#### 2. ROADMAP 2010 INDUSTRI NASIONAL

Tujuan jangka panjang 25 tahun tersebut dicapai secara bertahap melalui pembangunan berjangka lima tahunan. Dalam lima tahun pertama sampai tahun 2010, pembangunan industri nasional harus dipacu secepat mungkin untuk mencapai:

- a. Pertumbuhan Ekonomi di atas 7%
- b. Peningkatan Daya Tarik Investasi dan Daya Saing Ekonomi Bangsa

c. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Angka Kemiskinan.

Untuk mencapai sasaran jangka menengah tersebut, setidaknya diperlukan tiga ujung tombak kebijakan strategis, berupa:

- a. Kebijakan untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi total industri nasional;
- b. Kebijakan untuk melakukan reorientasi arah kebijakan ekspor dari ekspor bahan mentah menjadi ekspor barang jadi;
- c. Kebijakan untuk melakukan penataan ulang tata niaga pasar dalam negeri.

yang difokuskan pada Sepuluh Master Industri unggulan.

Misi dan kebijakan strategis harus diwujudkan secara sistematis, bertahap dan konsisten melaksanakan secara strategis, **enam kelompok prioritas implementasi dan tindakan nyata**, melalui pelbagai insentif bagi industri nasional dalam rangkaian paket kebijakan moneter dan fiskal yang diintegrasikan kedalam kebijakan industri dan perdagangan. Keenam kelompok prioritas tersebut adalah:

**a. Insentif Fiskal**

Dukungan insentif fiskal dan pendanaan bagi peningkatan investasi dan daya saing industri melalui pembenahan dan modernisasi sarana-prasarana, seperti: pemberdayaan industri nasional pembangkit listrik dan sumber energi lainnya, modernisasi pelabuhan dan bandara, pengembangan jalan tol dan konstruksi, peningkatan kemampuan nasional dalam industri telekomunikasi.

**b. Dukungan Finansial**

Dukungan finansial bagi industri pengolahan hasil laut dan kemaritiman, melalui integrasi antara pengembangan kluster industri pengolahan hasil laut dengan program peningkatan produktivitas nelayan dan program peningkatan kestabilan *feedstock*. Hal ini terkait dengan:

- Pengembangan kawasan/zona penangkapan ikan, kluster pelabuhan dan tempat pelelangan ikan yang menyediakan fasilitas "*cold storage*", SPBU penyedia solar dan bahan bakar bersubsidi bagi perahu nelayan.
- Pengembangan kapasitas laboratorium uji produk perikanan di sentra-sentra produksi.
- Pengembangan pusat benih unggul dan sentra produksi pakan ikan budi daya.
- Pemberdayaan industri perkapalan dalam negeri untuk program motorisasi perahu nelayan dan pengembangan armada kapal penangkap ikan nasional.

**c. Prioritas Kebijakan dan Penegakan Hukum**

- Dukungan prioritas kebijakan ekonomi bagi terwujudnya kemampuan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di dalam negeri, melalui integrasi antara kluster industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dengan program peningkatan dan kestabilan *feedstock* yang berkualitas tinggi.
- Dukungan penegakan kepastian hukum dan jaminan keamanan untuk pengembangan hutan tanaman industri serta pencegahan *illegal logging*, bagi terwujudnya integrasi industri kehutanan (pengolahan kayu, pulp, kertas dan industri mebel) dengan jaminan *feedstock*

Hal ini juga terkait dengan program peningkatan produktivitas lahan, penggunaan benih unggul, pupuk majemuk dan pupuk nutrisi, pembenahan

infrastruktur irigasi dan skema pembiayaan pertanian.

**d. Pendalaman Struktur Industri**

Restrukturisasi, modernisasi dan pendalaman struktur industri padat modal dan teknologi. modernisasikan mesin/peralatan produksi industri tekstil dan produk tekstil. kembangkan industri komponen dan pendukung (*supporting industries*) elektronika dan otomotif.

Diperlukan insentif-insentif untuk investasi yang berorientasi pada pengembangan industri komponen dan *supporting industry*, modernisasi permesinan dan peningkatan kandungan teknologi produk. misal: modernisasi permesinan untuk industri tekstil dan produk tekstil, perpindahan teknologi dari analog ke digital untuk industri elektronika yang diikuti dengan pengembangan industri komponen dan *supporting industry*. pengembangan basis "*global value chain*" untuk industri otomotif.

**e. Reorientasi Hubungan Bilateral, Multilateral**

Reorientasi pendekatan hubungan dagang bilateral, regional dan multilateral serta penguatan jaring-jaring pengaman pasar domestik untuk menciptakan persaingan yang adil bagi pertumbuhan industri dalam negeri

Lebih selektif dalam liberalisasi perdagangan internasional dengan memperhatikan kondisi objektif industri dalam negeri, terutama faktor-faktor eksternal yang menghadang perkembangan dunia usaha. Merekomendasikan agar Pemerintah melakukan **langkah-langkah proaktif** untuk mengatur pola kompetisi pasar domestik. Perlindungan pasar domestik dari penetrasi barang ilegal (selundupan, barang palsu/tiruan), produk impor yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, barang-barang bekas yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.

**f. Kebijakan Ekspor Bahan Mentah**

Reorientasi kebijakan ekspor produk bahan mentah migas dan non-migas. laksanakan proses *shifting* kebijakan ekspor bahan mentah, menjadi kebijakan ekspor produk bernilai tambah tinggi melalui proses produksi di dalam negeri.

Kembangkan kluster petrokimia terintegrasi yang terdiri dari jejaring industri pengolah *crude oil (refineries)* dan gas alam dengan industri olefin, aromatik dan pupuk serta industri hilir seperti tekstil, plastik sebagai bahan baku industri komponen elektronika, otomotif, perkapalan dan industri packaging. bangun industri bio-fuel berbasis CPO dan etanol untuk *sustainability* sumber energi bagi masa depan industri

**3. SEPULUH KLASTER INDUSTRI UNGGULAN**

Keenam kelompok prioritas tersebut perlu diimplementasikan pada industri-industri unggulan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) klaster industri. Kesepuluh klaster yang menjadi fokus pembangunan industri nasional tersebut adalah:

**a. Klaster industri unggulan pendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 7 %**

1. Industri tekstil dan produk tekstil, sepatu dan alas kaki;
2. Industri elektronika dan komponen elektronika;
3. Industri otomotif dan komponen otomotif;
4. Industri perkapalan.

**b. *Klaster industri unggulan peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa***

5. Industri pengembang infrastruktur, seperti industri pembangkit sumber energi, industri telekomunikasi, pengembang jalan tol, konstruksi, industri semen, baja dan keramik;
6. Industri barang modal dan mesin perkakas;
7. Industri petrokimia hulu/antara, termasuk industri pupuk

**c. *Klaster industri unggulan penggerak pencipta lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan***

8. Industri pengolahan hasil laut dan kemaritiman;
9. Industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, termasuk industri makanan dan minuman;
10. Industri berbasis tradisi dan budaya, utamanya: industri jamu, kerajinan kulit-rotan dan kayu (permebelan), rokok kretek, batik dan tenun ikat.

**4. TIGA MISI UTAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL**

Upaya melaksanakan tiga misi utama pembangunan industri nasional perlu dilakukan secara intensif dan eksetensif, masing-masing sebagai berikut:

**a. *Pertumbuhan ekonomi di atas 7%***

Angka pertumbuhan yang moderat untuk potensi ekonomi nasional itu dapat dicapai melalui:

1. peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi seperti Elektronika dan Komponen Elektronika, Otomotif dan Komponen Otomotif, industri padat modal dan keterampilan sumber daya manusia seperti Tekstil dan Produk Tekstil, Sepatu dan Alas Kaki,
2. peningkatan kapasitas ekspor produk industri olahan berbasis bahan baku migas dan non-migas, yang berasal dari eksplorasi sumur minyak dan gas alam yang baru. Pembangunan 9 (sembilan) kilang refinari yang diintegrasikan dengan pengembangan industri petrokimia, dan pengembangan industri berbasis teknologi yang menyerap banyak tenaga kerja.

**b. *Peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa***

Peningkatan daya tarik investasi dan daya saing ekonomi bangsa perlu diupayakan melalui:

1. langkah restrukturisasi untuk penciptaan struktur biaya produksi yang kompetitif dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dari industri pengembang infrastruktur seperti pengembang ialan tol, industri pembangkit sumber enersi, industri telekomunikasi;
2. implementasi kebijakan pendalaman struktur industri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan komponen setengah jadi, dengan pengembangan klaster industri penunjang (*supporting industry*) dan jaringan industri komponen, agar teriadi:
  - i. pengurangan impor bahan baku dan produk komponen setengah jadi, dengan kebijakan stimulus fiskal pagi terciptanya jaringan "*supporting industry*" dan industri komponen pada sektor elektronika dan otomotif,
  - ii. penciptaan dan pengimplementasian Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk *non-tariff barrier* bagi produk industri negara lain,

- iii. pemberantasan penyelundupan untuk menghilangkan distorsi pasar domestik,
- iv. pembenahan infrastruktur jalan raya dari kawasan industri ke pelabuhan bongkar muat dan bandar udara, untuk penurunan biaya transportasi, logistik dan distribusi produk industri ke pasar,
- v. modernisasi alat peralatan produksi dengan penggunaan mesin hemat energi dan ramah lingkungan.

c. **Penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan**

Penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan diupayakan melalui:

1. Langkah-langkah pemberdayaan:
  - i. sektor industri berbasis pertanian & perkebunan,
  - ii. sektor industri berbasis tradisi & budaya, dan
  - iii. sektor industri tekstil & produk tekstil, sebagai motor pencipta lapangan kerja.
2. Pelaksanaan reorientasi kebijakan ekspor, dari orientasi ekspor bahan mentah menjadi orientasi ekspor produk setengah jadi dan produk akhir.
3. Pelaksanaan langkah restrukturisasi total industri nasional untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, dengan pengembangan klaster industri dan modernisasi permesinan.

## **B. LANGKAH TAKTIS**

Di samping Cetak Biru Industri Nasional di atas, ada langkah-langkah taktis yang perlu ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah tersebut terdiri atas enam kelompok bidang yang satu sama lain kelak akan saling terkait, yaitu:

### **1. INFRASTRUKTUR**

Keterlambatan dalam penyediaan infrastruktur seperti listrik, air, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, perluasan ruas jalan, dan sebagainya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kadin telah berpartisipasi dua tahun berturut-turut melaksanakan **Infrastructure Summit** pada tahun 2005 dan 2006, namun kecepatan realisasi proyek infrastruktur masih di bawah harapan dunia usaha. Langkah taktis untuk mempercepat penyediaan infrastruktur tersebut perlu dilaksanakan segera mengingat proyek tersebut memerlukan waktu yang cukup lama pada proses konstruksinya.

### **2. KETENAGAKERJAAN**

Pemberlakuan UU Nomor 13 tahun 2003 di lapangan mengakibatkan penyempitan lapangan kerja formal, karena undang-undang ini cenderung lebih berat pada kepentingan tenaga kerja dan tidak memperhatikan dampaknya pada kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya tenaga kerja dan aspek-aspek ketenaga kerjaan lainnya. Salah satu ketentuan yang dirasakan memberatkan dunia usaha adalah tentang pesangon dan pengupahan sehingga diperlukan langkah taktis dunia usaha dalam hal ini diwakili oleh Kadin untuk mengupayakan perbaikan peraturan ketenagakerjaan yang membebani dunia usaha dan mempersulit perluasan lapangan kerja.

### **3. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan terbesar yang digunakan oleh dunia usaha adalah perbankan. Permasalahan pada perbankan Indonesia adalah tidak optimalnya fungsi intermediasi, walaupun beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia, Pemerintah, Perbankan dan Kadin melakukan konsensus untuk melonggarkan ketentuan perbankan yang dinilai menghambat fungsi intermediasi mulai 1 April 2007 namun pada kenyataannya perbankan nasional masih terlalu ketat dan bersikap terlalu pasif dalam menyalurkan kredit pada sektor riil. Untuk optimalisasi fungsi intermediasi tersebut Kadin perlu mengambil langkah taktis dalam meyakinkan perbankan untuk mulai aktif menyalurkan kreditnya.

### **4. PERDAGANGAN**

Peningkatan perdagangan internasional melalui optimalisasi peran kedutaan RI di luar negeri serta kerjasama multilateral dan bilateral di dalam WTO dan *International Chamber of Commerce* mutlak untuk terus ditingkatkan, penetrasi pada negara-negara yang volume impornya sedikit dari Indonesia perlu diupayakan secara intensif. Di samping perdagangan internasional perlu pula ditingkatkan pengamanan pasar dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan perdagangan domestik. Langkah taktis untuk memberantas penyelundupan melalui kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini antara lain dengan Polri dan Bea Cukai perlu dilaksanakan secara intensif.

### **5. INDONESIA INCORPORATED**

Terkait dengan perdagangan, salah satu kelemahan dunia usaha Indonesia adalah lemahnya "jaringan bisnis," terutama dalam pengertian belum adanya keterpaduan dalam kegiatan dunia usaha nasional memasuki dan menghadapi pasar global. Keterpaduan yang lazim disebut "Indonesia Incorporated" telah banyak dibahas, tapi tidak pernah terwujud. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh "market" dengan menekan harga produk Indonesia.

Jajaran Kadin yang memiliki struktur organisasi sampai ke tingkat kabupaten/kota perlu untuk segera berupaya mengembangkan Jaringan Bisnis Nusantara yang dapat diwujudkan dengan menjadikan atau membangun semua tingkatan Kadin – provinsi dan kabupaten/kota - sebagai pusat-pusat Jaringan Bisnis Nusantara melalui sarana atau media IT.

Jaringan Bisnis Nusantara ini akan menjadikan Kadin sebagai Kapal Induk Dagang Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar DN maupun LN dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan produk Indonesia dipermainkan oleh market. Untuk itu, Kadin Indonesia perlu segera merealisasikan program strategis ini.

### **6. PEMBERDAYAAN UMKM**

Peran UMKM dalam menanggulangi angka pengangguran yang tinggi sangat besar dengan karakternya yang lentur, dinamis dan kemampuan penyerapan tenaga kerja pada lingkungan usahanya sangat membantu upaya perluasan lapangan kerja. Karena itu pemberdayaan UMKM perlu dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang lebih "berpihak." Setidaknya ada empat kelompok kebijakan untuk pemberdayaan UMKM yang perlu segera ditetapkan, yakni:

- a. Peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan
  - b. Pengembangan pasar produk UMKM
  - c. Pengembangan akses UMKM pada sumber daya manusia yang berkualitas
  - d. Regulasi-regulasi perizinan dan perpajakan yang lebih berpihak pada UMKM
- Konsensus Bank Indonesia untuk melonggarkan persyaratan kredit bagi UMKM yaitu dari penilaian 3 pilar: prospek industri, balance sheet/neraca, kemampuan

membayar menjadi hanya penilaian kemampuan membayar, maka Kadin harus segera mengawal konsensus BI ini agar menjadi langkah nyata penyediaan pembiayaan bagi UMKM.

Di samping hal pembiayaan UMKM tersebut perlu diambil langkah taktis untuk pengembangan UMKM yaitu meliputi akses pasar, manajemen dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM.

## **7. TEKNOLOGI**

Kemajuan dan penerapan teknologi terkini sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sehingga Kadin perlu melakukan langkah-langkah untuk mempromosikan penerapan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dunia usaha.

## **8. GOOD GOVERNANCE**

*Good Governance*, sering diterjemahkan sebagai penadbiran yang baik, atau tata-kelola yang baik, merupakan mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas kinerja lembaga, organisasi ataupun perusahaan. *Good Governance* merupakan konsep yang universal dan bersifat lintas-batas negara.

*Good Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, penerapan *Good Governance* merupakan tanggung jawab tiga pilar yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat.

Setiap pilar memiliki prinsip dasar yang harus diperankan masing-masing. Penyelenggara negara -- yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif -- harus menyediakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum secara konsisten.

Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *Good Corporate Governance* atau GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.

Masyarakat sebagai warga negara pengguna produk dan jasa dunia usaha sekaligus sebagai pihak yang terkena dampak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta dampak dari keberadaan perusahaan, harus menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Kadin bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) akan menyusun roadmap dan rekomendasi perbaikan *governance* yang harus dilakukan oleh setiap pilar.

### III

## PROGRAM KADIN 2007

### A. UMUM

**R**apimnas Kadin 2007 telah membahas rangkaian program kerja dalam 14 kelompok menurut bidang koordinasi para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Secara keseluruhan, program kerja Kadin Indonesia disusun terutama untuk memenuhi salah satu fungsi utama Kadin, yakni mewakili dunia usaha dalam forum-forum penentuan kebijakan. Program kerja yang diringkaskan dalam laporan hasil Rapimnas ini adalah yang sesuai dengan upaya mewujudkan Kebijakan Strategis berupa Visi Pembangunan Industri 2030 dan Roadmap Industri 2010 sebagai Kebijakan Strategis, dan Langkah Taktis sebagai pedoman pelaksanaannya. Program-program tidak dikelompokkan menurut bidang koordinasi para wakil ketua umum, tetapi menurut substansi permasalahan yang akan dilaksanakan.

#### 1. PROSPEK 2007

Menjelang dan memasuki tahun 2007, optimisme akan perekonomian Indonesia yang lebih baik memang muncul di beberapa kalangan. Optimisme ini terkait dengan membaiknya beberapa indikator makro, seperti nilai ekspor meningkat, inflasi rendah, rupiah menguat, dan pasar modal dalam negeri *booming*.

Perlu disadari bahwa semua perbaikan tersebut tidak akan berarti tanpa perbaikan nyata di sektor produksi riil. Rendahnya persetujuan dan realisasi investasi selama tahun 2006 diperkirakan akan menjadi penghambat yang sangat berpengaruh pada kegiatan produksi pada tahun 2007 ini. Tanpa kebijakan yang bersifat insentif di sektor produksi, rendahnya minat investasi tersebut akan bermuara pada rendahnya kegiatan produksi di sektor riil pada tahun 2007 ini.

Kondisi investasi pada tahun 2006 lalu sangat berbeda dengan kondisi yang dicapai pada tahun 2005. Meskipun menjelang akhir tahun 2005 tingkat investasi mengalami penurunan, namun secara keseluruhan gairah investasi di tahun 2005 jauh lebih baik dari tahun 2006. Pada tahun 2005, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) naik relatif tinggi, masing-masing mencapai 93,7 persen dan 100,9 persen. Kondisi inilah yang memungkinkan dicapainya pertumbuhan sekitar 5,5 persen pada tahun 2006 lalu. Sementara itu pada Januari - November 2006, realisasi PMA dan PMDN mengalami penurunan masing-masing sebesar 45,8 persen dan 37,1 persen terhadap periode yang sama tahun 2005.

Relatif kuatnya stabilitas moneter pada tahun 2006 bisa menjadi modal bagi adanya percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007. Pemanfaatan stabilitas makro ekonomi ini selayaknya segera direalisasikan dalam bentuk implementasi kebijakan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, selagi kredibilitas pemerintah masih relatif baik. Dikhawatirkan jika momentum ini tidak segera dimanfaatkan secara baik, maka guncangan politik akan menjadi penghambat perbaikan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

#### 2. LANGKAH KADIN INDONESIA TAHUN 2007

Tahun 2007 adalah tahun ketiga dari Visi Pembangunan Industri 2030. Dalam tahun 2007, jajaran Kadin memprioritaskan upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah sebagai titik sentral dengan penekanan pada program:

- Perbaikan Iklim Usaha;
- Penajaman Prioritas Pembangunan;
- Peningkatan Daya Saing; dan
- Pengembangan Warisan Budaya Nasional.

Sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987, Kadin telah melakukan berbagai peran, khususnya dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha serta mendorong tumbuhnya investasi baik dalam maupun luar negeri.

Kadin Indonesia bersama-sama asosiasi sektoral terkait berperan aktif dalam memberikan berbagai masukan dalam upaya mewujudkan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat pro business seperti misalnya dalam:

- RUU Investasi,
- RUU Pajak,
- RUU Kepabeanaan,
- RUU Perdagangan,
- RUU Jaminan Produk Halal;
- RUU Ketenagalistrikan;
- RUU Jamsostek
- Amandemen UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kebijakan berupa PP yang saat telah terbit dimana Kadin beserta seluruh asosiasi berperan aktif antara lain PP tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Kadin Indonesia juga aktif dalam upaya :

- Mendorong Program Harmonisasi Tarif Lanjutan
- Mendorong penerapan Standarisasi Produk Indonesia
- Promosi konsep pembangunan One Village One Product (OVOP)
- Sosialisasi Hasil-Hasil KTM - WTO
- Member! masukan dalam perundingan EPA dan SIAP serta rancangan kebijakan di sektor sektor lainnya.

Dalam upaya mempertajam arah dan prioritas pembangunan Kadin Indonesia telah pula berpraktisa menyelenggarakan Round Table Discussion dalam rangka penyusunan Visi Pembangunan Industri Nasional 2030 dan Roadmap Industri 2010 yang menghasilkan rekomendasi Roadmap Prioritas Pembangunan 10 Sektor Industri.

Berbagai kerjasama antara Kadin Indonesia dengan lembaga pemerintahan telah semakin meningkat. Kerjasama dengan Departemen Perdagangan dilakukan melalui kegiatan pameran dagang baik di dalam maupun luar negeri seperti telah dilaksanakan dalam pameran ISE 2006 di Shanghai dan CAEXPO 2006 di Manning; Seminar dan Workshop Indonesia Design Power 2006. Kerjasama dengan Departemen Perindustrian dilaksanakan antara lain melalui Pameran Bursa Komponen bekerjasama dengan JETRO Jakarta; Promosi Intermediasi Perbankan bekerjasama dengan Bank Indonesia.

Pembangunan industri nasional perlu dibarengi dengan upaya pengembangan warisan budaya nasional, yaitu pembangunan yang juga berbasis pada kekuatan budaya nasional, khususnya nilai-nilai estetika budaya nusantara yang beraneka ragam serta memiliki potensi besar dalam peningkatan daya saing produk Indonesia baik di pasar lokal maupun internasional. Langkah ini bukan romantisme masa lalu, tetapi pendayagunaan secara cerdas potensi tersebut sebagai modal utama untuk memperkokoh perkembangan industri masa depan yang bernilai tambah tinggi. Pembangunan industri yang berbasis budaya ini diyakini akan menghasilkan devisa maupun peningkatan lapangan kerja bagi UKM terutama di daerah saat ini menyerap tenaga kerja 79 juta orang dengan nilai produksi sekitar Rp 1.1 triliun.

Percepatan pertumbuhan ekonomi nasional juga memerlukan upaya-upaya kongkrit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan peran serta pelaku usaha daerah. Road Map Industri 2010 dan Visi 2030 perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah untuk disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing provinsi, penyebaran sentra-sentra industri ke seluruh daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus segera dilaksanakan dengan perencanaan tata ruang jangka panjang yang matang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, REGULASI DAN KEBIJAKAN**

Pertumbuhan dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir relatif lambat. Beberapa kendala terutama bersumber pada peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang kurang kondusif. Untuk membentuk iklim usaha yang lebih mempercepat pengembangan dunia usaha, termasuk untuk peningkatan investasi, perlu ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan lainnya. Kadin sebagai wakil dunia usaha dalam forum penentuan kebijakan telah menginventarisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang perlu ditetapkan, direvisi atau dikaji ulang, ataupun perlu segera ditetapkan peraturan pelaksanaannya, bahkan ada yang cenderung ditolak, yakni:

01. Penetapan PP UU Penanaman Modal
02. Penyusunan UU Cyber Law/UU ITE
03. Revisi UU Pajak
04. Revisi UU Kepabeanaan,
05. RUU Energi
06. Revisi UU Ketenagalistrikan
07. RUU Mineral dan Batubara
08. PP UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi
09. RUU Perdagangan,
10. RUU Jaminan Produk Halal
11. RUU Jamsostek
12. Revisi Undang Undang Telekomunikasi
13. Revisi Undang Undang Penyiaran
14. Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
15. Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16. Revisi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
17. PP UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
18. Revisi berbagai PP dan regulasi di bidang ketenagakerjaan, seperti:
  - Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan
  - Revisi SKB Hari Libur Nasional
  - Kepmenakertrans NO. 20 tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan TKA
  - Kepmenakertrans No. 68 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
19. RUU Pelayanan Publik
20. PP dan sosialisasi UU No.17 tahun 2006
21. PP Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
22. Revisi UU No.5 tahun 1960 pokok Agraria dan PerPres no.36/2005 tentang pembebasan lahan agar lebih memberikan kepastian hukum dan iklim investasil lebih kondusif
23. Revisi PP No.15 tahun 2005 tentang jalan tol agar lebih kondusif bagi investasi jalan tol di Indonesia.
24. Pembahasan RUU tentang Pelayanan Publik
26. PP UU No.17 tahun 2006
27. RUU Perpajakan
28. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
29. Revisi PP no. 33 tahun 1996 untuk disampaikan kepada Pemerintah.
30. Peraturan Pemerintah ( RPP ) tentang Kawasan Industri
31. PP Kawasan Industri, PP Kawasan Berikat, PP tentang Pertanahan, UU tentang Free Trade Zone.
32. Penyusunan RUU Pelayan Publik

### **C. INFRASTRUKTUR, LISTRIK DAN ENERGI**

1. Infrastruktur, listrik dan energi merupakan jantung pemacu daya hidup seluruh kegiatan ekonomi.
2. Dalam pembangunan infrastruktur, jajaran Kadin akan terus berupaya agar roadmap infrastruktur yang disusun tahun 2004 terealisasi dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan perkembangan.
3. Mendorong pemerintah agar segera membenahi seluruh regulasi investasi infrastruktur di Indonesia.
4. Promosi Investasi di Sektor Ketenagalistrikan dan Energi, mencakup briket batubara, energi terbarukan, panas bumi
5. Pengkajian penggunaan utama minyak dan gas bumi dalam peranannya sebagai komponen bahan baku industri.
6. Melanjutkan penyusunan model pengembangan jarak pagar sebagai sumber energi alternatif (biodiesel), melalui penyelenggaraan pelatihan biodiesel berbasis jarak pagar dan sosialisasi tanaman jarak pagar.
7. Mengadakan pertemuan dengan stakeholder di sector masing-masing untuk menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada.
8. Membuat konsep model-model Kawasan Industri Terpadu, Kawasan Berikat, FTZ, FIZ sebagai percontohan.
9. Mengadakan seminar, lokakarya dan sejenisnya pada sektoral-sektoral dalam rangkaian mensosialisasikan kebijakan dan konsep model percontohan.
10. Mendorong pembahasan RUU Perdagangan yang menjamin iklim usaha dan daya saing yang sehat.

### **D. KEBUJAKAN PUBLIK**

1. Dalam rangka program pencegahan HIV-AIDS bagi perusahaan peduli AIDS Komtap Kebijakan Publik bekerjasama dengan Komite Kemanusiaan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Workshop Program Pendampingan bagi perusahaan Peduli HIV-AIDS, direncanakan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
2. Konsep Sistem Integritas Nasional merupakan pengembang konsep besar pulau-pulau integritas untuk pencegahan korupsi, terutama dalam Pengadaan Barang Jasa. Filosofi adalah membuat Transaksi Dasarnya adalah membuat transaksi bisnis diantara kontraktor menjadi lebih fair, untuk itu Transparansi Indonesia bekerjasama dengan Komtap kebijakan Publik menyelenggarakan Workshop dan Training Pengadaan Barang/Jasa Publik.
3. Mendorong pemerintah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi (debirokratisasi) agar lebih efisien dan cepat dalam pemberian pelayanan, disamping menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

### **E. INVESTASI**

Menyelenggarakan "Indonesian Capital Market and Investment Conference/Expo, Singapore 2007, yang akan dilaksanakan pada Medio tahun 2007 di Singapura, dimana sesuai rencana akan diresmikan oleh Presiden RI bersama petinggi Singapura

### **F. INDUSTRI**

1. Restrukturisasi total industri nasional dan peningkatan peran *supporting industry* berskala kecil dan menengah, dengan mengembangkan:
  - Revitalisasi Industri Nasional melalui pengembangan jaringan kerjasama antara Hulu & Hilir, *supporting industry*.

- Reorientasi kebijakan industri, fokus pada pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam, sebagai motor penggerak kesempatan kerja.
  - Konsolidasi Kekuatan Industri Nasional dalam menghadapi meningkatnya Biaya Energi dan Menurunnya Kualitas Infrastruktur Ekonomi Indonesia. Terutama pada Industri Padat Modal & Teknologi, seperti : Otomotif, TPT & elektronika.
2. Peningkatan produktivitas, daya saing dan inovasi produk industri nasional Indonesia, melalui:
- Revitalisasi & Integrasi kelembagaan dalam satu *task force* (lanjutan).
  - Sosialisasi & negosiasi agar terjadi modernisasi pada alat produksi industri TPT.
  - Sosialisasi & Negosiasi agar tercipta paket-paket kebijaksanaan pemerintah yang kompetitif untuk penanaman modal di DN, serta mendorong dilaksanakannya promosi –promosi peluang investasi di Indonesia (lanjutan).
  - Sosialisasi & negosiasi perlunya peningkatan produktivitas yang setara dengan negara pesaing melalui pendekatan *bench marking*
  - Sosialisasi & negosiasi perlunya peningkatan perlindungan pasar dalam negeri
  - Revitalisasi Industri Kecil Menengah Padat Tradisi, dan Keterampilan Seni Budaya Lokal, (seperti batik, jamu , industri kulit, dst) untuk bersaing di pasar domestik dan menjadi "*brand image*" Indonesia di pasar internasional (lanjutan).

## **G. Pertanian**

1. Kadin mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan impor sapi yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri sekaligus mendorong ekspor daging sapi olahan dari Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah utama yang dilakukan adalah:
2. Mendorong harmonisasi tarif komoditi ekspor dalam rangka meningkatkan akses pasar ekspor.
3. Mengupayakan adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pengembangan sekaligus sistem sertifikasi pertanian organik. Upaya ini akan dibarengi dengan pembentukan Asosiasi Pertanian Organik (Asperoni)
4. Mendorong tumbuhnya industri minyak sawit terpadu, antara lain dengan membentuk Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).
5. Merumuskan masukan untuk kebijakan mekanisasi pertanian
6. Mendorong pengembangan industri karet nasional, termasuk pembahasan pencabutan peraturan anti-dumping import duty carbon black sebagai bahan penolong utama barang jadi karet, dengan membentuk Dewan Komoditi Karet Indonesia.
7. Untuk mempercepat pembangunan daerah khususnya di sektor perkebunan, maka dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.140/7/2005 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK 06/2006 tentang kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, beberapa hal yang perlu dilakukan :
  - Prosedur penetapan mitra usaha agar tidak dilakukan dengan cara berbelit-belit dan memperhatikan serta memberi dorongan kepada pengusaha daerah yang mampu bekerja namun perlu dukungan dan terutama bagi perusahaan yang melaksanakan program inti plasma.
  - Perlu dikaji ulang pemberian kredit revitalisasi perkebunan kepada petani perorangan. Dalam hal ini agar pemberian kredit dilakukan melalui mitra usaha yang ada atau koperasi yang dibentuk khusus untuk itu.
  - Khusus untuk pelaksanaan program revitalisasi perkebunan diminta Departemen Keuangan menunjuk semua bank pemerintah yang mampu

melaksanakannya, agar program ini berjalan dengan cepat dan tidak menimbulkan kendala di daerah.

- Guna mendukung meningkatnya investasi di sektor perkebunan, pemerintah perlu menyederhanakan sistem dan perizinan dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- Perlunya data akurat dan sama, baik antar instansi maupun antar pusat dan daerah agar dalam penerbitan perizinan perkebunan cepat dan tepat serta tidak bertele-tele.

## **H. KELAUTAN**

Pengembangan industri maritim dan produk kelautan Indonesia melalui revitalisasi dan modernisasi industri maritim Indonesia antara lain dengan memasyarakatkan Kebijakan Maritim Nasional dalam rangka pemenuhan konsumsi dalam negeri dan tujuan ekspor.

## **I. PERDAGANGAN**

1. Sosialisasi UCP-600 sebagai penyempurnaan atas UCP-500, dimana UCP-600 telah diterbitkan pada akhir tahun 2006. Untuk hal ini tidak tertutup kemungkinan sepanjang masih diperlukan oleh kalangan perbankan maupun eksportir/importir, insurance dan angkutan serta lain-lain (karena telah beberapa kali dilaksanakan oleh beberapa Konsultan di Jakarta), dimana Komite Tetap Perbankan akan melaksanakan Sosialisasi UCP-600 bekerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini.
2. Dalam rangka kerjasama ASEAN, aktif berpartisipasi melakukan harmonisasi tarif komoditi ekspor dalam rangka meningkatkan akses pasar (ekspor).
3. Aktif memberikan masukan mengenai produk sensitif Indonesia yang sejalan dengan Perundingan WTO Putaran Doha memungkinkan negara-negara berkembang melindungi produk sensitif, produk khusus, penerapan mekanisme pengamanan perdagangan khusus terkait dengan bidang pertanian.
4. Peningkatan pasar dan produksi dalam negeri melalui:
  - Penertiban sistem perdagangan dalam negeri
  - Peningkatan program Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia
  - Pengembangan sistem keagenan dan distribusi yang tertata dan efisien
  - Pola Distribusi Nasional antara lain menata waralaba/franchise, toko nyaman/convenient store, peningkatan pasar tradisional, serta menata pasar modern dan hypermarket.
5. Peningkatan ekspor dengan melaksanakan:
  - Roadmap Ekspor Indonesia
  - Pemilihan produk andalan ekspor mencakup 10 produk ekspor utama (Kadinda, /industri/daerah)
  - Pembentukan sarana ekspor "House of Indonesia" di 10 negara (akan dimasukkan dalam program JICA).
  - Mendorong pengembangan merek nasional di pasar dalam dan luar negeri.
  - Peningkatan promosi luar negeri melalui fasilitas Deplu dan Depdag
  - Pembentukan forum/tim bersama Kadin-Depdag untuk pembahasan pameran di luar negeri.
6. Perbaiki iklim usaha dan daya saing
  - Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja professional perdagangan.
  - Mapping daya saing industri dan produk berkaitan dengan unggulan ekspor.

## **J. TRANSPORTASI**

1. Mencari solusi hambatan transportasi dari kawasan industri ke Pelabuhan Tg. Priok, baik melalui pendekatan dengan Menteri Perhubungan dan instansi terkait lainnya, maupun melalui dialog dengan para stakeholder di sector transportasi ( Dep. Perhubungan, Dep. PU, Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan ) .
2. Mengupayakan untuk mengoptimalkan jalur Kereta Api (KA) untuk memperlancar arus barang industri dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi belum terlaksana karena jalur KA tidak memiliki akses langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok dan biayanya lebih mahal.
3. Melanjutkan penyelenggaraan pertemuan/dialog dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor transportasi.

## **K. TELEKOMUNIKASI**

1. Broadcastnomic: Aktif dalam kajian kebijakan ekonomi media yang dilakukan KPI sebagai bagian dari penyiapan memasuki era konvergensi
2. Seminar "new business models in convergence era" Mempertemukan financial institution termasuk pemodal ventura untuk bertemu dengan para "inventor" bisnis models
3. Ikut serta dalam kajian roadmap industri Dalam Negeri untuk telekomunikasi dirstand djpostel - Mendorong tumbuhnya industri Dalam Negeri
4. Ikut serta dalam kajian kebijakan konten dan penyusunan code of conduct untuk konten DJAPTEL Kominfo - Mendorong tumbuhnya industri konten sebagai bagian dari era konvergensi dan pendukung industri telekomunikasi
5. Mendorong ikut sertanya para pembuat perangkat telekomunikasi, aplikasi dan konten untuk ikut communic-asia dengan menggabungkan potensi pembiayaan DJIATT Deperin dan DJPT Depkominfo

## **L. INFORMATIKA**

1. Survei Perniagaan Perangkat Lunak, bekerjasama dengan KomInFo, DeTIKNas, Aspiluki & Apkomindo
2. Industri konten/animasi, bekerjasama dengan DitJen IATT/Departemen Perindustrian, asosiasi industri konten/Ainaki, universitas/BiNus, untuk pengembangan dan pemasarannya

## **M. TEKNOLOGI**

1. Dalam bidang teknologi, kegiatan difokuskan pada promosi dan intensifikasi penerapan teknologi tinggi, terutama teknologi hayati (bioteknologi) dalam rangka peningkatan produksi hayati pangan, baik untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk pasar ekspor.
2. Sosialisasi dan promosi pengembangan sumber daya genetika Indonesia dengan menerapkan rekayasa genetika molekuler sumber hayati tanaman pangan, seperti padi dan kako, serta sumber hayati hewani, seperti intensifikasi penerapan inseminasi buatan dan transfer embrio sapi pedaging.
3. Program difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan bantuan atau dorongan bagi segera ditetapkannya kebijakan Pemerintah yang kondusif bagi perkembangan, pemanfaatan dan komersialisasi bioteknologi dan sumber daya hayati di Indonesia.

## **N. PROPERTI**

1. Mengupayakan adanya hak kepemilikan properti bagi orang asing, antara lain dengan memperpanjang Hak Pakai melalui perubahan PP 41 tahun 1996, serta

pemberian Visa tinggal bagi orang asing yang membeli property/rumah di Indonesia, minimal 10 tahun, adanya aturan yang lebih jelas tentang hak waris bagi properti orang asing di Indonesia, serta kemudahan bagi orang asing untuk mengakses KPR.

2. Penciptaan peluang investasi properti, dengan menerbitkan data-data tentang perkembangan pembangunan property yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan untuk menarik investasi asing; mendorong penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Special Ekonomi Zone (SEZ) sebagai peluang investasi bagi pengembangan sektor property selain sector industri, dan adanya one stop service (pelayan satu atap) dalam proses pelayanan terhadap public.
3. Mendorong BI agar mewajibkan perbankan nasional tetap menyalurkan kredit property, dengan meyakinkan bahwa property investasi yang aman..
4. Agar non fixed income group dapat mengakses KPR bersubsidi maka perlu segera dibentuk atau menghungsikan yang sudah ada ( PT. SMF ) menjadi lembaga penjamin KPR (asuransi)
5. KPR agar tetap mendapat subsidi baik untuk RSH maupun RUSUNA dengan bunga KPR tertinggi maksimal 10%.
6. Mendorong dikeluarkannya ketetapan oleh Meneg BUMN, ataupun Keputusan Bank Indonesia untuk menjadikan BTN sebagai Bank Perumahan
7. Bekerjasama dengan Kantor Menpera dan DPP REI memfasilitasi terbentuknya program Tabungan Perumahan Nasional

## **O. PARIWISATA**

1. Menyusun Konsep Tourism Reputation Building sebagai complementary dan enrichment Renstra Departemen Kebudayaan dan Kepariwisata.
2. Mengusulkan penancangan Tahun Kunjungan Wisata 2008 (Visit Indonesia Year 2008), dimana Kadin / Kadin Provinsi sebagai Koordinator Pelaksana event-event di daerah. (Private led)

## **D. LINGKUNGAN**

1. Sosialisasi dan pengembangan proyek CDM melalui asosiasi-asosiasi terkait.
2. Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada Lomba Produk Unggulan Daerah dan penyelenggaraan "CSR Village Award."
3. Penyelenggaraan Trade and Environment dikembangkan melalui kerjasama dengan Pemerintah Australia Barat melalui Program Austreat ( Australia Eco Agro Trade ).

## **Q. MONETER DAN FISKAL**

### **Keuangan-Perbankan**

1. Sedang dirintis pembentukan Institute of Capital Market di Indonesia khususnya di Jakarta yang pertama kali dan sebagai pusat kajian/informasi pasar.
2. Tetap memperjuangkan ke pihak Bank Indonesia agar masalah penjaminan surat-surat berharga ke pihak dunia perbankan dapat dilaksanakan bagi perusahaan-perusahaan publik, guna mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.
3. Melobi Bank Indonesia untuk memperkecil pemberian *spread* SBI agar perbankan nasional dapat mengucurkan kreditnya kepada sektor riil.

### **Perpajakan**

1. Perhimpunan Pembayar Pajak (Tax Prayer Association) akan diluncurkan

2. Menyelenggarakan Seminar Perpajakan dengan bekerjasama dengan IKPI atau organisasi profesi lainnya
3. Advokasi Perpajakan secara makro
4. Meneruskan pengawalan RUU Perpajakan
5. Memantau kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan memperjuangkan agar Pemerintah menaikan NJOP secara wajar.
6. Stimulus Pajak-pajak Properti
  1. Mengupayakan penurunan PPnBM Properti dari 20% menjadi 10%
  2. Mengupayakan adanya pengurangan PPN dari 10% menjadi 5%
  3. Mengupayakan agar pengembang dibebaskan atas biaya BPHTB dan PBB atas tanah selama tanah (inventory) dikuasai pengembang
  4. Mengupayakan adanya insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kawasan Timur Indonesia untuk pengembangan Property.
  5. Mengkritisi pemberlakuan Pajak Barang Mewah untuk rumah menengah/mewah
  6. Penjajagan kemungkinan penurunan bea masuk material/peralatan untuk proyek-proyek property.
  7. Mengupayakan agar transaksi portofolio KPR dipasar sekunder dibebaskan PPN
  8. Pembebasan PPN bagi transaksi RSH yang melalui KPR bersubsidi dapat dibebaskan secara otomatis sesuai dengan criteria RSH dari Menpera
  9. Mengupayakan agar PPN bagi transaksi RUSUNAMI yang melalui KPR bersubsidi dapat dibebaskan, termasuk PPN jasa kontraktor bagi pembangunan RUSUNAMI.

## **D. KETENAGAKERJAAN**

### **Hubungan Industrial**

Masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah hubungan industrial, sangat berpengaruh pada iklim investasi. Banyak masalah hubungan industrial perlu penanganan yang intensif dan berkesinambungan. Untuk tahun 2007, diprioritaskan adanya hubungan industrial yang lebih kondusif, antara lain melalui:

1. Mengaktifkan kembali LKS Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang dicanangkan melalui PP 8/2005. Langkah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan pembentukan LKS Tripartit Nasional Ketenagakerjaan Sementara.
2. Pembentukan Forum Komunikasi & Konsultasi Bipartit Nasional (FKKBN), sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen delegasi Indonesia ke sidang ILO di Jenewa Juni 2001 (ILC 89); komunike kesepakatan bipartit antara delegasi pengusaha dan pekerja Indonesia dalam sidang ILO di Jenewa Juni 2002 (ILC 90) dan Juni 2003 (ILC 91).
3. Mendorong restrukturisasi Sistem Jaminan Sosial, antara lain pembahasan status Jamsostek dari bentuk persero menjadi wali amanah (trust fund) yang independen dengan pengawasan Tripartit dan bertanggung jawab kepada DPR melalui Badan Komisararis Wali Amanah, Menteri atau Presiden dalam bentuk penyampaian laporan tahunan, laporan khusus, atau laporan periodik yang diaudit akuntan publik.

### **Pendidikan dan Kewirausahaan**

Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, dalam tahun 2007 programnya difokuskan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan kewirausahaan.

1. Perluasan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, terutama di lembaga diklat perusahaan dan Apjati, melalui

pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri.

2. Pengembangan wirausahawan baru dengan pendekatan pelatihan yang bersifat terpadu guna menjamin berkembangnya kegiatan penciptaan wirausahawan baru yang berkesinambungan, khususnya pelatihan tenaga PHK terampil, dengan membentuk Pusat Informasi Tenaga Kerja Nasional Kadin Indonesia

### **S. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Program Bidang UKM 2007 merupakan kelanjutan dari program tahun-tahun 2004-2006. Di antara program-program tersebut, ada yang lebih mengarah pada pembentukan model-model pengembangan UKM yang dapat diaplikasikan oleh setiap jajaran Kadin sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya masing-masing; tapi ada juga yang lebih fokus pada terbentuknya kebijakan yang lebih "favourable" bagi UKM.

1. Penyusunan konsep kebijakan pembiayaan yang lebih kondusif untuk UKM melalui pengembangan kredit perbankan; sumber pembiayaan alternatif, penjaminan kredit, dan jasa modal ventura.
2. Pengembangan sumber-sumber modal alternatif untuk mendorong tumbuhnya industri jasa pembiayaan alternatif untuk UKM, seperti obligasi, trustee funds, dan pemanfaatan dana pensiun
3. Penyusunan desain model pusat informasi komoditi dalam upaya membentuk pusat informasi komoditi sebagai prasarana dan sarana commodity exchange
4. Pembentukan database industri basis pengembangan pasar, database industri skala UKM
5. Desain UKM Estate dalam rangka merancang aplikasi konsep alternatif bagi jajaran Kadin dalam membina industri dan pasar produk UKM
6. Diseminasi informasi dan penyuluhan manajemen untuk mendorong tumbuhnya apresiasi yang lebih baik dalam pengelolaan usaha pada UKM
7. Penyebaran teknologi tepat guna untuk membuka peluang diversifikasi usaha bagi pengusaha
8. Modeling jaringan produsen dan pasar yang bisa diterapkan oleh jajaran Kadin sesuai dengan potensi daerah masing-masing
9. Sosialisasi pemanfaatan situs-situs internet dalam dan luar negeri untuk perluasan jaringan usaha
10. Penggunaan software legal (IGOS) oleh UKM dengan tujuan UKM menggunakan IGOS, software legal dan berbiaya rendah
11. Persiapan pembentukan inkubator bisnis dan business coaching usaha kecil dan menengah sektor telekomunikasi.
12. Mengupayakan agar paket peraturan perundang-undangan pemberdayaan UMKM yang antara lain mencakup juga lembaga penjaminan kredit segera ditetapkan.
13. Melobi agar alokasi dana keuntungan BUMN sebesar 5% untuk pengembangan UMK dimungkinkan untuk meningkatkan modal lembaga penjamin kredit.

### **T. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS**

#### **Good Corporate Governance**

1. Pemberian konsultasi dan asistensi implementasi GCG untuk Kadin daerah melalui ToT (Training for the Trainers) sekaligus menyelenggarakan klinik konsultasi percontohan di 5 Kadinda
2. Penelitian Kebijakan GCG bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Target penelitian sebanyak 3 buah hasil riset.
3. Penyusunan white paper on governance, kerjasama dengan ISEI dan Komite Nasional kebijakan Governance
4. Penyelenggaraan pelatihan, forum diskusi dan sosialisasi GCG serta mengadakan

- pemeringkatan (rating) pelaksanaan GCG
5. Melaksanakan advokasi kebijakan GCG oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan e-governance, dan atas regulasi pemerintah yang terkait dengan jasa publik dan bisnis.
  6. Memberikan wawasan dan panduan bagi anggota Kadin maupun perusahaan mengenai pentingnya penerapan GCG
  7. Mendorong pelaksanaan program *Good Corporate Governance* (GCG), *Good Governance* dan *Good Public Governance* dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha agar lebih kondusif, melalui gerakan Bersih Transparan dan Profesional (BTP), dengan mengedepankan program pembentukan Pulau-pulau Integritas.

### **Etika bisnis**

Melakukan survey penerapan *Code of Conduct* pada Asosiasi Usaha di Indonesia sekaligus sosialisasi etika bisnis melalui seminar.

### **Persaingan usaha**

Sosialisasi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku bisnis melalui penerbitan buku atau leaflet.

### **Pranata usaha**

1. Penerbitan buku pranata usaha yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia.
2. Pembentukan Klinik Pelayanan Hukum Bisnis Kadin Indonesia.

## **U. PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

Menyusun Roadmap Pembangkitan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia, Refleksi dan Perspektif Bagi Multi-Stakeholder. Roadmap ini bertujuan untuk:

1. Meletakkan kembali infrastruktur prioritas yang signifikan dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
2. Menggali sumber-sumber keuangan dengan memperluas jaringan bisnis keuangan antara pemerintah-pemerintah; pemerintah-bisnis dan bisnis-bisnis.
3. Mereformasi perda-perda yang tidak pro-ekonomi.
4. Mengembangkan sumberdaya manusia secara kualitatif dan kuantitatif sebagai pelaku bisnis melalui "spirit kewirausahaan", untuk menemukan kekuatan diri dan mengasah profesionalisme, membangun *attitude* yang positif, melatih sikap yang proaktif, kreatif dan berinisiatif, serta mengembangkan komunikasi bisnis yang cerdas dalam membangkitkan sikap dan jiwa *entrepreneurship*.

## IV PERKUATAN ORGANISASI

**S**ebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi 2030 dan roadmap 2010, diperlukan perkuatan organisasi Kadin. Untuk itu, berbagai langkah dasar perkuatan kelembagaan organisasi yang perlu dilakukan adalah, terutama:

1. Melanjutkan program website/KIIS (Kadin Integrated Information System), pengembangan dan manajemen data base
2. Digital Archiving/e-office, untuk diterapkan dalam kegiatan sekretariat Kadin Indonesia
3. Penyelenggaraan workshop direktur eksekutif Kadin Provinsi se-Indonesia. Workshop antara lain membahas mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran anggota biasa dan tercatat, mekanisme pelaporan dan pengolahan datanya. Selain itu materi-materi yang terkait dengan perkuatan sekretariat Kadin baik dari sisi SDM dan layanan-layanannya juga akan menjadi tema sentral dalam workshop tersebut. Direncanakan akan dilakukan 2 (dua) kali workshop pada tahun 2007.
4. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia  
Sebagai upaya melihat sejauh mana peran dan fungsi Kadin Provinsi dan Asosiasi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No 1/1987. Pelaksanaan rating akan dilakukan secara terpisah dengan metode penilaian dan persyaratan yang berbeda antara Kadin Provinsi dan Asosiasi. Salah satu outputnya adalah pemenang program rating ini dapat dijadikan sebagai "best practise" oleh Kadin Provinsi dan Asosiasi lainnya. Selain itu dapat menjadi masukan yang penting bagi Kadin Indonesia untuk merumuskan program pembinaan dan perkuatan organisasi dimasa mendatang.
5. Pelaksanaan Pilot Project Pemanfaatan Informasi WDP. Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Menteri Perdagangan R.I dan Ketua Umum Kadin Indonesia nomor: 01/M-DAG/KSB/6/2005 dan nomor: 070/DP/VI/2005 perihal pemanfaatan informasi WDP, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Batam dan Kadin Kota Batam pada tanggal 16 Januari 2006, workshop tindak lanjut pada tanggal 15 September 2006 di Kadin Indonesia. Di tingkat daerah, Kadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project masih melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan surat dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, kota yang disetujui sebagai Pilot Project adalah: Batam, Semarang dan Surabaya. Pada tahun 2007 ini akan dibuat sebuah sistim informasi dalam rangka pengolahan data dari kota-kota yang menjadi Pilot Project tersebut.
6. Training kewirausahaan bekerjasama dengan Asosiasi/Himpunan. Dalam rangka menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia maka Pokja pengembangan Entrepreneur melalui Asosiasi/Himpunan melanjutkan mengadakan pelatihan yang mencakup materi tentang bagaimana memulai sebuah bisnis, feasibility study, pengenalan pemasaran, permodalan. Untuk penajaman jenis bisnis berdasarkan sektor usaha, maka dilakukan kerjasama dengan asosiasi sektoral yang terkait. Salah satu contoh pelaksanaan training adalah memberikan pembekalan kepada Tenaga Kerja Luar Negeri untuk mampu menjadi wirausaha di tempat asalnya.
7. Pembentukan Layanan Investasi. Tujuan pembentukan Klinik Layanan Investasi adalah untuk memberikan jasa pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan investasi/penanaman modal, baik kepada investor dalam dan luar negeri, sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat tumbuhnya investasi baik PMA/PMDN. Materi meliputi: informasi potensi investasi, informasi peraturan perundangan dan perijinan investasi, layanan konsultasi investasi dan pengurusan dokumen perijinan investasi.

Pembentukan layanan investasi ini tidak hanya di Kadin Indonesia tetapi juga

- paralel di Kadin Kabupaten/Kota bekerjasama dengan DIHK, Ekonid.
8. Pembentukan Layanan Bisnis (Business Services) dan Business Qualifying Examination. Melakukan pengkajian dan pembentukan layanan bisnis (business services) yang berjalan dalam struktur organisasi Sekretariat Kadin Indonesia dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang kompeten
  9. Pendekatan dan lobi pada pemerintah agar menerbitkan peraturan pelaksanaan setingkat Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Peran dan fungsi Kadin saat ini belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia setiap Undang-undang harus mempunyai Peraturan Pemerintah sebagai landasan operasionalnya. Dengan adanya PP UU No. 1/1987 diharapkan penataan organisasi pengusaha dan perusahaan, pelimpahan tugas dari Pemerintah kepada Kadin dan lainnya dapat diatur lebih baik lagi. Harapannya setelah adanya PP UU Nomor 1 Tahun 1987 Kadin mampu memfungsikan dirinya sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1987. Alternatif lainnya dalam bentuk Keputusan Presiden
  10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Organisasi Kadin 2007. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapimnas Kadin 2007 dan sistem keanggotaan Kadin yang baru, maka perlu diadakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Organisasi Kadin 2007 dengan agenda acara antara lain:
    - a. Membahas Implementasi Program Kerja dan kegiatan yang terkait Bidang Organisasi berdasarkan hasil-hasil keputusan Rapimnas Kadin 2007.
    - b. Membahas penyempurnaan Surat Keputusan Kadin Indonesia nomor: Skep/124/DP/XII/2006 tentang Tatacara Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Kamar Dagang dan Industri.
  11. Dalam rangka perkuatan organisasi, diperlukan adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas serta dukungan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pendekatan pada pemerintah akan difokuskan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan oleh jajaran Kadin.
  12. Meningkatkan *capacity building* dengan lebih memberdayakan fungsi Asosiasi dan Komite Bilateral/Multilateral yang ada di lingkungan Kadin. Untuk Komite Bilateral/Multilateral yang dinilai tidak aktif atau masa kepengurusannya sudah habis, dilakukan evaluasi kembali dan restrukturisasi melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  13. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan organisasi, dilakukan sosialisasi aturan yang ada agar dapat lebih dipahami sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di samping itu agar nilai KTA dapat lebih bermakna, diharapkan seluruh jajaran Kadin dapat lebih meningkatkan dan menunjukkan kinerja serta pelayanannya, agar manfaat keanggotaan Kadin dapat lebih dirasakan bagi anggota.